

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP PELAYANAN PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN SILAE KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Elfiani M. Hasim^{1*}, Timuddin DG Mangera Bauwo², Ince Dian Afnita³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

20-01-2026

Disetujui:

28-01-2026

Dipublikasi:

19-02-2026

Kata Kunci:

*Implementasi Kebijakan;
Penanggulangan
Kemiskinan; Program Padat
Karya*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan program padat karya di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek kejelasan tujuan kebijakan, komitmen pelaksana, koordinasi, serta transparansi pelayanan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya dukungan masyarakat dan keterbatasan insentif peserta program. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat serta perbaikan manfaat program menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang bersifat multidimensional karena berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan intervensi kebijakan publik yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kebijakan publik pada hakikatnya adalah keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam mengatasi persoalan masyarakat, sehingga keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi terutama oleh proses implementasinya di lapangan. Menurut Nugroho (2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel penting seperti kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial politik, dan disposisi implementor.

Dalam konteks pelayanan publik, implementasi kebijakan harus mampu menghasilkan layanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas pihak lain yang berlangsung secara langsung maupun tidak langsung (Moenir, 2000). Kualitas pelayanan sendiri dapat dilihat dari indikator seperti kecepatan, ketepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan (Nasution, 1993). Dengan demikian, kualitas implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah program padat karya, yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja sementara dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memperkuat keterlibatan sosial serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Secara konseptual, program

pemberdayaan seperti ini dipandang efektif karena menggabungkan pendekatan bantuan sosial dan pemberdayaan produktif sekaligus.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya persepsi negatif terhadap program pemerintah. Hasil observasi awal di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu menunjukkan adanya indikasi lemahnya kerja sama masyarakat dan kecenderungan sikap individualistik dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada faktor sosial dan perilaku aktor yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan program padat karya di Kelurahan Silae serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan program penanggulangan kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program padat karya di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual serta memahami makna di balik tindakan dan pengalaman para pelaksana maupun penerima program.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kelurahan Silae karena wilayah ini merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program padat karya sekaligus memiliki karakteristik sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri atas aparat kelurahan, ketua RT, tokoh masyarakat, serta peserta program padat karya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara langsung, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang ditemukan di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat diverifikasi melalui perbandingan antar informan maupun antar teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program padat karya di Kelurahan Silae telah memiliki tujuan yang jelas serta pedoman pelaksanaan yang menjadi acuan bagi pelaksana

program. Sosialisasi tujuan program dilakukan secara berkala sehingga aparaturnya pelaksana memahami arah kebijakan dan sasaran program. Informan menyatakan bahwa kejelasan tujuan membantu mereka menjalankan tugas secara terarah dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sumber Daya Pelaksanaan

Dari aspek sumber daya, peserta program berasal dari masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan sasaran program telah dilakukan secara selektif. Selain itu, pelaksana program menilai bahwa kemampuan peserta dalam menjalankan tugas cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga kerja pada beberapa kegiatan.

Koordinasi Antarorganisasi

Koordinasi antara aparat kelurahan, ketua RT, dan tokoh masyarakat dinilai berjalan cukup efektif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka melalui pertemuan warga sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program.

Sikap Pelaksana Program

Pelaksana program menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas. Peserta program bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Disiplin kerja dinilai cukup baik karena adanya pengawasan langsung dari aparat kelurahan.

Kondisi Sosial Masyarakat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program masih bervariasi. Sebagian masyarakat memberikan dukungan positif karena merasakan manfaat ekonomi, sedangkan sebagian lainnya menilai program belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan.

Kecepatan Pelayanan Program

Pelayanan program dinilai cukup cepat, terutama dalam proses pendaftaran peserta dan pemberian fasilitas pendukung seperti jaminan kesehatan kerja. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada peserta.

Transparansi Pelayanan

Transparansi pelaksanaan program tergolong baik karena informasi mengenai prosedur, jadwal kerja, dan hak peserta disampaikan secara terbuka. Informan menyatakan bahwa mekanisme program dijelaskan secara langsung sebelum kegiatan dimulai sehingga peserta memahami aturan yang berlaku.

Ketepatan Pelayanan

Meskipun pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal kerja, terdapat kendala pada ketepatan pemberian honorarium. Beberapa peserta menyampaikan bahwa pembayaran upah terkadang mengalami keterlambatan dan jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan ekonomi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program padat karya di Kelurahan Silae secara umum telah berjalan dengan baik, terutama dari segi kejelasan tujuan kebijakan, koordinasi pelaksana, serta sikap aparaturnya. Kejelasan tujuan merupakan indikator penting keberhasilan implementasi karena memberikan arah yang jelas bagi pelaksana dalam menjalankan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2008) yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari sisi sumber daya, ketepatan penentuan sasaran program menunjukkan bahwa mekanisme seleksi peserta telah dilakukan sesuai kriteria kebijakan. Dalam teori implementasi, ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat penting karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pendapat ini sejalan dengan model

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang menempatkan sumber daya sebagai variabel kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi antarorganisasi yang berjalan efektif menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Koordinasi memungkinkan adanya kesamaan persepsi antar pelaksana serta mempercepat penyelesaian permasalahan selama pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter & Van Horn (1975) yang menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Sikap pelaksana yang menunjukkan tanggung jawab dan komitmen turut memperkuat efektivitas program. Disiplin kerja peserta mencerminkan adanya kesadaran terhadap kewajiban serta motivasi untuk memperoleh manfaat program. Faktor sikap pelaksana ini selaras dengan pandangan Moenir (2000) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perilaku aparatur sebagai penyedia layanan.

Meskipun demikian, dukungan masyarakat yang belum merata menunjukkan bahwa legitimasi sosial program masih perlu diperkuat. Persepsi masyarakat terhadap manfaat program sangat memengaruhi tingkat partisipasi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sosial, kebijakan berpotensi menghadapi resistensi atau partisipasi rendah sehingga efektivitasnya menurun.

Kecepatan dan transparansi pelayanan yang dinilai baik menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi informasi memperkuat kepercayaan masyarakat karena proses pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka. Hal ini sejalan dengan konsep kualitas pelayanan menurut Nasution (1993) yang menekankan bahwa indikator pelayanan yang baik meliputi ketepatan, kejelasan prosedur, dan keterbukaan informasi.

Namun demikian, kendala ketepatan pembayaran honorarium menunjukkan bahwa aspek administratif dan manajerial masih perlu diperbaiki agar tidak menurunkan motivasi peserta. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka dalam jangka panjang dapat memengaruhi keberlanjutan program serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program padat karya dipengaruhi oleh kombinasi faktor tujuan kebijakan, sumber daya, koordinasi, sikap pelaksana, serta dukungan sosial masyarakat. Optimalisasi faktor pendukung dan penanganan faktor penghambat menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program padat karya di Kelurahan Silae secara umum telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh kejelasan tujuan program, koordinasi pelaksana yang efektif, serta sikap aparatur yang responsif dalam memberikan pelayanan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan sumber daya, dukungan masyarakat yang belum merata, serta ketidaktepatan waktu pembayaran honorarium peserta. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya, penguatan partisipasi masyarakat, dan perbaikan manajemen administrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

REFERENSI

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Moenir, A. S. (2000). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nasution, M. N. (1993). *Manajemen terpadu*. Alumni.

Nugroho, R. (2008). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.